

J U R N A L  
**PENDIDIKAN  
NONFORMAL**

Peta Orientasi Filosofi dan Profesionalitas Kerja Pamong Belajar  
*M. Djauzi Moezakir; Abdillah Hanafi (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, FIP UM)*

Efektivitas Penyelenggaraan Program Kursus di Kabupaten dan Kota Bandung Jawa Barat  
*Sopingi (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM)*

Eksistensi Kearifan Lokal dan Bentuk Transformasi Sosial Masyarakat Transisi  
*Hardika (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, FIP UM)*

Persepsi dan Aplikasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi Mahasiswa Aktivistis  
Universitas Negeri Malang  
*Endang Sri Redzeki (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM)*

Metode Pembelajaran Sentra dan Lingkaran dalam Pengembangan Kecerdasan Interpersonal  
Anak pada Kelompok Bermain Restu 2 Malang  
*Rifa'atul Machmudah (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM)*

Format Pembelajaran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan,  
Studi Kasus pada BKM Erlangga Pasuruan  
*Erwin Dwi Hananing; S. Mundzir; Urub Urbiyanto (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM)*

Pelaksanaan Pembelajaran Life Skills bagi Korban Penyalahgunaan Napza, Studi Kasus di UPT  
Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur  
*Cindy Wulansari, Suripan (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM)*

Peran Orang Tua dalam Pengembangan Kecerdasan Bahasa Anak Usia Dini  
*Alimatul Ulum; Ach. Rasyad; Muchsin Zain (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM)*

# JURNAL PENDIDIKAN NONFORMAL

Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan serta kajian analistis-kritis di bidang pendidikan nonformal. ISSN 1978-7138

## **Ketua Penyunting**

Sopingi

## **Wakil Ketua Penyunting**

Zulkarnain

## **Penyunting Penyelia**

Mulyadi Guntur Waseso

Supriyono

## **Penyunting Pelaksana**

Imam Hambali

Suripan

Lasi Purwito

Sri Wahyuni

Prawoto

## **Pelaksana Tata Usaha**

Citra Wahyu Pusparani

Feranda Oktorani

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah FIP Universitas Negeri Malang, Gedung E2 Lt. 1 Jln. Semarang 5 Malang 65145 Telepon (0341) 551312 pesawat 225 Fax (0341) 557160 Homepage: <http://w.w.w.plsum@yahoo.com>

---

JURNAL PENDIDIKAN NONFORMAL. Diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP Universitas Negeri Malang bekerjasama dengan Subdin PLS Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ikatan alumni Jurusan PLS UM, BPPLSP Surabaya. Terbit pertama kami tahun 2007 dengan JURNAL PENDIDIKAN NONFORMAL

---

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS A4 spasi ganda sepanjang lebih kurang 20 halaman dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang (Persyaratan Naskah untuk Jurnal Pendidikan Nonformal). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman formal, istilah, dan tata cara lainnya. Penulis yang naskahnya dimuat menyumbang biaya pencetakan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per judul.

---

Dicetak di Percetakan. Isi di luar tanggung jawab Percetakan.

<b>Peta Orientasi Filosofi dan Profesionalitas Kerja Pamong Belajar</b> <i>M. Djauzi Moezakir; Abdillah Hanafi (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, FIP UM) .....</i>	63
Efektivitas Penyelenggaraan Program Kursus di Kabupaten dan Kota Bandung Jawa Barat <i>Sopingi (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM) .....</i>	71
Eksistensi Kearifan Lokal dan Bentuk Transformasi Sosial Masyarakat Transisi <i>Hardika (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, FIP UM) .....</i>	81
Persepsi dan Aplikasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi Mahasiswa Aktivistis Universitas Negeri Malang <i>Endang Sri Redzeki (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM) .....</i>	92
Metode Pembelajaran Sentra dan Lingkaran dalam Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Anak pada Kelompok Bermain Restu 2 Malang <i>Rifa'atul Machmudah (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM) .....</i>	99
Format Pembelajaran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, Studi Kasus pada BKM Erlangga Pasuruan <i>Erwin Dwi Hananing; S. Mundzir; Urub Urbiyanto (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM) .....</i>	108
Pelaksanaan Pembelajaran <i>Life Skills</i> bagi Korban Penyalahgunaan Napza, Studi Kasus di UPT Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur <i>Cindy Wulansari, Suripan (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM) .....</i>	116
Peran Orang Tua dalam Pengembangan Kecerdasan Bahasa Anak Usia Dini <i>Alimatul Ulum; Ach. Rasyad; Muchsin Zain (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM) .....</i>	120

# EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM KURSUS DI KABUPATEN DAN KOTA BANDUNG JAWA BARAT

Sopingi

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM  
e-mail: sopingi\_mlg@yahoo.com

***Abstract:** This research article presents the finding of research undertaken during 2011. The aim of this research was to assess the effectiveness of the courses program implementation in Bandung, West Java. Questionnaires and a focus group discussion (FGD) were conducted to get the data. The findings show that course programs were ineffectively implemented, and the monitoring and supervision to programs were ineffectively undertaken by the district government's*

**Abstrak:** Artikel ini memaparkan temuan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penyelenggaraan program kursus di wilayah Bandung Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil penelitian mendapati bahwa penyelenggaraan program kursus di wilayah Bandung belum diselenggarakan secara efektif, dan kegiatan monitoring dan supervisi oleh Dinas pemerintah terkait juga belum dapat dijalankan secara efektif.

**Kata kunci:** efektivitas, program kursus, dan lembaga kursus dan pelatihan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sistem pendidikan nasional dibangun dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), yang mengatur semua aspek sistem, seperti peserta didik, tenaga pendidik, kelembagaan, pengelolaan, pembiayaan, bidang kompetensi atau keahlian, jenjang dan jenis pendidikan, dan lain-lain, yang harus dijalankan dalam prinsip keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak dasar warga negara. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pendidikan nonformal (PNF) ditujukan untuk menyediakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk dapat mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi

dan mengembangkan usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Sihombing (1999) menyatakan bahwa tujuan PNF lebih difokuskan pada bagaimana peserta didik dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk meningkatkan martabatnya dan kualitas hidupnya dengan didukung oleh aspek akademis yang mantap. Pendidikan nonformal juga merupakan pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan berwirausaha. David Evans (1981) mengelompokkan pendidikan nonformal dalam 3 kategori, yaitu PNF sebagai pendidikan pelengkap (*complementary education*), penambah (*supplementary education*) dan pengganti (*replaces*) bagi pendidikan formal. Hadirnya pendidikan nonformal merupakan tuntutan dan realitas sosial, mengingat pendidikan

formal memiliki sejumlah keterbatasan, di antaranya adalah keterbatasan daya jangkau, daya tampung, dan juga daya untuk mampu menyiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja. Lulusan pendidikan formal seringkali memerlukan pendidikan tambahan dan pelengkap berbagai keterampilan kerja yang diperlukan untuk masuk dunia kerja. Pendidikan nonformal berfungsi untuk mengatasi sejumlah kesenjangan yang ada di masyarakat. Karena terbatasnya waktu, biaya atau alasan lain, karyawan atau pegawai seringkali memerlukan layanan pendidikan nonformal sebagai alternatif.

Program dan satuan pendidikan nonformal sangat luas dan kompleks. Pasal 26 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan PNF terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kursus merupakan salah satu bentuk satuan PLS yang paling populer. Istilah kursus secara umum ditujukan sebagai bentuk pelatihan keterampilan kepada peserta didik yang membutuhkan dan diselenggarakan secara non formal. Menurut Forsyth (1995) kursus adalah penyiapan beragam jenis keterampilan yang diperuntukkan bagi warga belajar yang membutuhkannya. Kursus sebagai suatu format pembelajaran berupa kelompok peserta yang pertemuannya dilakukan pada waktu tertentu dengan lama waktu tertentu dalam kerangka untuk mempelajari suatu bidang studi yang terbatas di bawah bimbingan seorang pelatih (Arif, 1986). Penyebutan jenis program kursus selalu dikaitkan dengan jenis kompetensi atau keterampilan yang dipelajari, misalnya kursus menjahit, kursus komputer, kursus bahasa, kursus

memasak, kursus kecantikan, dan sebagainya. Besarnya jumlah kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat dibandingkan dengan yang diselenggarakan oleh pemerintah cenderung berakibat pada tidak adanya keseragaman dalam menyediakan standar layanan pendidikan. Artinya, ada lembaga kursus yang mampu menyediakan layanan pendidikan dengan standar pelayanan tinggi, dan sebaliknya ada pula yang memberikan layanan pendidikan dengan standar rendah, kalau tidak boleh dikatakan hanya sekedar menyediakan layanan pendidikan utama yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang mengikuti kursus dan kebutuhan belajarnya. Walaupun terdapat variasi dalam menyediakan layanan pendidikan, namun berbagai program belajar yang disediakan oleh lembaga kursus tetap diminati masyarakat dan lulusan dari berbagai kursus yang memiliki standar layanan berbeda itu memiliki peluang yang sama untuk memenuhi peluang kerja. Dengan fakta yang demikian, perlu diketahui bagaimana profil penyelenggaraan kursus itu dilihat dari komponen sistem pembelajarannya. Pengetahuan tentang profil komponen sistemik pembelajaran ini perlu diketahui sebagai bahan masukan bagi pengembangan, pembinaan, maupun penetapan standar pendidikan pada lembaga kursus.

Penyelenggara kursus pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat yang terdiri atas individu, yayasan dan perusahaan. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya lembaga kursus sebagai bagian dari pendidikan nonformal adalah; (1) meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah dan aspirasi pendidikan masyarakat tidak dapat terserap secara penuh dan kurang terlayani seluruhnya oleh sistem pendidikan formal; (2) lembaga kursus sebagai bagian dari pendidikan nonformal dapat melakukan fungsinya sebagai pelengkap atas kekurangan yang terdapat pada pendidikan formal; (3) lembaga kursus mampu memberikan keuntungan relatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan formal ditinjau dari aspek pembiayaan, waktu dan keterampilan yang diperoleh.

Jumlah lembaga kursus yang sangat besar dibandingkan satuan-satuan pendidikan lainnya merupakan aset yang sangat berharga bagi dunia pendidikan di Indonesia, di mana prakarsa masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan telah

berkembang. Perkembangan yang demikian pesat itu perlu terus didorong dan ditingkatkan mutunya agar sumber daya manusia yang dihasilkan semakin dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri. Untuk itu pemerintah bersama institusi terkait perlu terus melakukan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan program kursus mulai dari penataan kelembagaan, program belajar dan komponen sistemik pembelajarannya. Penelitian Supriyono (2009) tentang kursus memberikan data, bahwa untuk seluruh unit komponen penyelenggaraan sistem pembelajaran pada kursus terdapat variabilitas yang berbeda-benda. Terdapat perbedaan dan persamaan komponen sistemik pembelajaran pada kursus, baik antar wilayah maupun antar jenis kursus. Untuk beberapa jenis kursus dibutuhkan adanya kurikulum berstandar internasional karena terkait dengan adanya lisensi internasional kemampuan tertentu.

Dibutuhkan pula sebuah sistem perencanaan dan penatakelolaan pembelajaran yang sistematis dan berbasis manajemen. Sebagai perkembangan dari program magang, maka ada kecenderungan pada kursus untuk tidak membuat perencanaan pengembangan kelembagaan dan program pembelajaran. Lembaga kursus perlu dibimbing atau dibina sehingga memiliki kesiapan berkembang lebih lanjut menjadi lembaga pendidikan yang lebih sistematis dalam hal pengaturan komponen sistem kelembagaan dan pembelajarannya. Penataan lembaga kursus ini dibutuhkan sebagai upaya menyongsong standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi, baik yang ditujukan untuk penataan kelembagaan, program belajar, maupun lulusan. Menghadapi globalisasi dunia dan pasar bebas, lembaga kursus di Indonesia perlu ikut berbenah diri agar tidak kalah bersaing dengan lembaga kursus dari luar negeri. Saat ini telah ada lembaga kursus asing yang telah buka cabang atau membuka *franchise* di Indonesia, seperti misalnya lembaga *English First* untuk kursus bahasa Inggris, kursus menjahit, dan beberapa jenis kursus komputer.

Dengan demikian nyata sekali bahwa di tengah perkembangan kursus yang demikian pesat ini perlu terus didorong dan ditingkatkan mutunya agar sumber daya manusia yang dihasilkan semakin dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri. Untuk itu pemerintah bersama institusi terkait perlu secara terus-menerus melakukan pembinaan

dan pengembangan kursus mulai dari penataan kelembagaan, program belajar dan komponen sistemik pembelajarannya.

Berkaitan dengan perkembangan kursus di atas maka tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi atau penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan program kursus dilihat dari komponen *input* program, proses program dan *output* program serta peran pemerintah terhadap penyelenggaraan program kursus. Hasil penelitian evaluasi ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi yang perlu diberikan untuk perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan program kursus dalam perspektif tata kelola atau manajemen profesional.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan jenis evaluasi implementasi kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah penyelenggaraan program kursus yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP) di Kabupaten dan Kota Bandung. Jumlah sampel sebanyak 30 program kursus, dipilih secara acak. Jumlah responden penelitian sebanyak 100 orang, terdiri atas 30 orang penyelenggara kursus, 30 orang instruktur, 30 orang peserta, dan 10 orang penilik.

Evaluasi difokuskan pada efektivitas penyelenggaraan program kursus, meliputi efektivitas pada komponen *input*, proses, dan *output* program kursus. Penggalan data dilakukan melalui penyebaran angket dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Penyebaran angket ditujukan kepada 4 kelompok responden, yaitu pengelola kursus, instruktur, peserta, dan penilik. Diskusi kelompok terfokus diikuti oleh perwakilan responden sebagai informan, dan dipilih secara acak.

Analisis data dilakukan dengan (1) deskriptif persentase untuk data kuantitatif (hasil survey); dan (2) analisis tema-tema hasil temuan penelitian untuk data kualitatif (hasil FGD). Pembahasan dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang relevan, untuk selanjutnya diberikan makna atau interpretasi. Penilaian efektivitas dilaku-

kan dengan desain pengukuran tunggal yang dikembangkan Reeves (dalam Mawardi, 2006) dengan cara menghitung; (1) rata-rata skor penilai, yaitu jumlah skor penilaian seluruh penilai pada setiap butir soal dibagi jumlah penilai, (2) persentase dari skor maksimum, yaitu rata-rata skor penilaian penilai (hasil nomor 1) dibagi skor maksimum X 100% (skor maksimum); dan (3) rata-rata skor penilaian total, yaitu jumlah rata-rata skor penilaian tiap butir soal dibagi jumlah butir soal. Penentuan tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pada setiap komponen evaluasi didasarkan pada kriteria berikut, yaitu; (1) bila rerata skor perolehan data kurang dari 60% skor maksimal, maka komponen evaluasi tersebut dinilai tidak atau kurang efektif; (2) bila rerata skor perolehan data 60% – 80% skor maksimal, maka komponen evaluasi tersebut dinilai cukup efektif; dan (c) bila rerata skor perolehan data di atas 80% skor maksimal, maka komponen evaluasi tersebut dinilai efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### *Komponen Input*

Data yang digali sebagai dasar untuk melakukan penilaian efektivitas terhadap komponen *input* penyelenggaraan program kursus meliputi; (1) penyiapan peserta; (2) penyiapan desain program dan kurikulum; (3) penyiapan modul, silabus, RPP, dan jadwal pembelajaran; (4) penyiapan instruktur; (5) penyiapan sarana belajar dan sarana pendukung; dan (6) penyiapan tata kelola keuangan dan administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) sebagian besar LKP penyelenggara program kursus (>71%) tidak melakukan pemilihan/seleksi peserta dan tidak memperhatikan kesiapan belajar peserta didik; (2) sebagian besar LKP (>63%) tidak melakukan penyiapan desain program dan kurikulum berdasarkan analisis kebutuhan peserta dan dunia usaha dan industri (DUDI) secara memadai; (3) sebagian besar LKP (>70%) telah menyusun dan memiliki modul, silabus, dan jadwal pembelajaran program kursus, tetapi hanya sebagian kecil LKP (<21%) saja yang memiliki SAP pada setiap mata kursus; (4) sebagian besar LKP (>75%) memiliki

jumlah instruktur secara memadai, tetapi hanya sebagian kecil LKP (<11%) saja yang memiliki kriteria pemilihan dan desain pengembangan kompetensi instruktur secara jelas; (5) sebagian besar LKP (>54%) memiliki sarana belajar dan sarana pendukung secara memadai; (6) sebagian kecil LKP (<33%) yang melakukan tertib tata kelola keuangan dan administrasi.

Mengacu pada kriteria efektivitas yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa efektivitas komponen *input* penyelenggaraan kursus pada LKP di Kabupaten dan Kota Bandung termasuk kategori kurang efektif.

#### *Komponen Proses*

Data yang digali sebagai dasar untuk melakukan penilaian efektivitas terhadap komponen proses penyelenggaraan program kursus meliputi; (1) proporsi proses pembelajaran (teori, praktik dan magang); (2) kemampuan instruktur melakukan kegiatan pembelajaran; (3) keberfungsian dan pemanfaatan media dan sarana belajar lainnya; (4) pemberian penghargaan dan perlindungan (harlindung) kepada instruktur; dan (5) mekanisme dan proses evaluasi hasil belajar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) kegiatan pembelajaran pada penyelenggaraan program kursus pada sebagian besar LKP (>81%) dilakukan secara proporsional, di mana proporsi materi praktik lebih banyak dibanding teori; (2) instruktur pada sebagian besar LKP (<53%) dinilai mampu melakukan proses pembelajaran sesuai standar; (3) media dan sarana belajar yang disediakan untuk kegiatan pembelajaran program kursus pada sebagian besar LKP (>66%) dinilai fungsional dan dimanfaatkan secara optimal; (4) pemberian penghargaan dan perlindungan kepada instruktur pada sebagian besar LKP (>72%) kurang memadai; dan e) evaluasi hasil belajar peserta didik program kursus pada sebagian LKP (>68%) telah dilaksanakan sesuai standar.

Berpijak pada kriteria efektivitas yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa efektivitas komponen proses penyelenggaraan program kursus pada LKP di Kabupaten dan Kota Bandung termasuk cukup efektif.

### **Komponen Output**

Data yang digali sebagai dasar untuk melakukan penilaian efektivitas terhadap komponen *output* penyelenggaraan program kursus meliputi; (1) kelulusan peserta; (2) *grade* atau tingkat kemampuan lulusan; (3) keterserapan lulusan pada dunia usaha dan industri (DUDI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) kelulusan peserta pada ujian program kursus pada sebagian besar LKP (>88%) tinggi; (2) tingkat kemampuan lulusan program kursus pada sebagian besar LKP (>91%) adalah tingkat mahir; dan (3) keterserapan lulusan kursus pada dunia usaha dan industri (DUDI) dan/atau melakukan usaha mandiri atau berwirausaha pada sebagian besar LKP (> 69%) termasuk kategori rendah.

Mengacu pada kriteria efektivitas yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa efektivitas komponen *output* penyelenggaraan program kursus pada LKP di Kabupaten dan Kota Bandung termasuk kategori kurang efektif.

### **Peran Instansi Pemerintah**

Data yang digali sebagai dasar untuk melakukan penilaian efektivitas terhadap peran instansi pemerintah terhadap penyelenggaraan program kursus difokuskan pada efektivitas fungsi supervisi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, meliputi fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program kursus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) sebagian besar LKP (>53%) menyatakan bahwa fungsi koordinasi Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan program kursus dinilai cukup; (2) sebagian besar LKP (>72%) menyatakan bahwa fungsi pembinaan dari Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan program kursus kurang sesuai kebutuhan; (3) sebagian besar LKP (>68%) menyatakan bahwa fungsi pengendalian dan pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan program kursus kurang fungsional.

Mengacu pada kriteria efektivitas yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran Dinas Pendidikan dalam melakukan fungsi koordinasi dan supervisi pada penyelenggaraan program kursus

pada LKP di Kabupaten dan Kota Bandung termasuk kategori kurang efektif.

### **Pembahasan**

#### ***Efektivitas Komponen Input***

Efektivitas komponen *input* penyelenggaraan program kursus yang dilaksanakan oleh LKP di Kabupaten dan Kota Bandung termasuk kategori kurang efektif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pada umumnya LKP tidak melakukan hal-hal berikut, yaitu seleksi peserta, identifikasi kemampuan awal peserta, dan identifikasi kesiapan belajar peserta. Hal ini bermakna bahwa proses penyiapan peserta program kursus belum banyak dilakukan oleh LKP. Temuan pola rekrutmen yang demikian belum mampu menggambarkan dan memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan kursus sebagaimana dikonsepsikan dalam buku pedoman penyelenggaraan program kursus tahun 2011. Model seleksi yang demikian belum mampu menghasilkan *prototype* atau konfigurasi peserta didik yang benar-benar siap belajar dan siap bekerja setelah mengikuti program kursus, padahal seleksi peserta sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan kursus. Keberhasilan program pembelajaran antara lain ditentukan oleh proses rekrutmen peserta, yaitu peserta yang benar-benar membutuhkan program (Tracey 1989). Keberhasilan penyelenggaraan kursus antara lain ditentukan oleh pola seleksi yang lebih mampu menjamin kesanggupan dan keberlangsungan proses belajar peserta.

Dalam sesi FGD ditemukan adanya peserta yang hanya mengikuti pembelajaran di awal saja dan putus belajar karena tidak tertarik untuk belajar lebih lanjut karena berbagai alasan, termasuk karena merasa sudah dapat bekerja dengan kemampuan kerja yang telah dipelajari di program kursus walaupun belum tuntas proses pembelajarannya. Identifikasi minat dan kesiapan belajar peserta belum menjadi perhatian, padahal minat dan kesiapan belajar peserta juga merupakan faktor yang turut menentukan keberhasilan. Knowles (1995:43) menandakan bahwa salah satu faktor penting bagi keberhasilan program pendidikan dan pelatihan pada proses rekrutmen peserta adalah minat. Hasil penelitian Foxon (1989:91) menyebutkan bahwa keefektifan penyelenggaraan



program pembelajaran ditentukan oleh tingginya minat peserta. Pada pembelajaran orang dewasa, pengalaman belajar merupakan sumber belajar yang penting dan patut diperhatikan (Knowles, 1984:44).

Hal demikian menunjukkan bahwa kemampuan awal (*entry behavior*) peserta menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan program kursus, dan ini merupakan titik kritis pada komponen *input* dalam penyelenggaraan program kursus di Kabupaten dan Kota Bandung.

Kedua, temuan penelitian menunjukkan bahwa; (1) penyiapan desain program dan kurikulum program kursus pada umumnya belum didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, karena tidak satu pun LKP yang melakukan analisis kebutuhan; (2) desain program dan kurikulum untuk satu jenis kursus yang digunakan beragam; (3) tidak pernah dilakukan peninjauan ulang kurikulum yang digunakan; dan (4) kompetensi yang dikembangkan lebih pada kompetensi vokasi. Dalam kondisi demikian LKP akan mengalami kesulitan untuk dapat mengembangkan desain program dan kurikulum yang tepat sesuai kebutuhan. Dessler (2004: 217) menegaskan bahwa analisis kebutuhan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengetahui keterampilan kerja spesifik yang dibutuhkan, menganalisis keterampilan dan kebutuhan calon yang akan dilatih, dan mengembangkan pengetahuan khusus yang terukur serta tujuan prestasi. Dengan minimnya data yang dapat dijadikan dasar maka desain program dan kurikulum program kursus yang dikembangkan atau digunakan cenderung beragam, dan tingkat ketepatan desain program dan kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik sulit dipertanggung-jawabkan. Kondisi demikian semakin diperparah dengan kenyataan bahwa kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan program kursus adalah kurikulum yang biasa dipakai dan jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan peninjauan ulang.

Orientasi kompetensi yang dikembangkan pada program kursus adalah pada penguasaan kompetensi vokasi, sementara kompetensi personal dan sosial yang terkait dengan kompetensi vokasi tersebut belum banyak diperhatikan. Model penyelenggaraan pembelajaran yang demikian belum mampu memberikan penguatan secara proporsional dan memadai kepada peserta untuk benar-benar siap bekerja pada

dunia kerja dan dapat tumbuh-kembang menjadi pekerja yang cakap dalam merespon terhadap setiap situasi kerja pada profesi yang ditekuni. Kompetensi sosial dan personal merupakan faktor penting yang turut menentukan perkembangan karier seseorang dalam suatu pekerjaan atau profesi yang ditekuni. Penguasaan keterampilan teknis memang dibutuhkan, akan tetapi kemampuan teknis itu dapat berkembang secara cepat apabila disertai dengan persepsi diri seorang pekerja dan kemampuan komunikasi sosial di lingkungan kerjanya. Schrag (1987) menegaskan bahwa pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu yang sesuai dengan standar performansi yang telah ditetapkan.

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan data bahwa pada umumnya LKP telah menyediakan sarana belajar dan sarana pendukung pembelajaran secara cukup memadai. Namun dalam sesi FGD diperoleh keterangan bahwa sarana belajar tersebut hanya berupa gedung dan ruang belajar yang dapat dikatakan memadai, sementara sarana belajar yang berupa fasilitas proses belajar-mengajar seperti media dan bahan belajar dikatakan masih sangat kurang. Alat dan sarana belajar yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran biasanya sekaligus berupa alat kerja. Situasi ini masih jauh dari harapan, di mana seyogianya setiap LKP memiliki sarana, alat, media, dan bahan belajar yang mencukupi untuk efektivitas belajar peserta didik (Ditjen PMPTK, 2007). Sebagaimana dituntut oleh dunia kerja dan industri yang perkembangan peralatan produksinya berkembang sangat cepat. Apabila peralatan belajar yang digunakan pada program kursus sudah *out of date*, maka lulusannya akan mengalami kegagalan dalam menghadapi peralatan dunia kerja yang telah lebih canggih.

Keempat, temuan penelitian menunjukkan bahwa penyiapan instruktur belum optimal, karena meskipun jumlah instruktur cukup memadai tetapi desain pemilihan dan pengembangan kompetensi instruktur tidak jelas. Situasi demikian belum mampu menampakkan rasa optimisme dalam penyelenggaraan kursus. Instruktur kursus perlu mendapatkan perhatian dalam hal rekrutasi, pendidikan prajabatan, mobilisasi dan demobilisasinya (penugasan dan

pengunduran tugas), Sebaiknya instruktur kursus adalah orang yang mumpuni dalam hal pengalaman kerja dan penguasaan metode serta penerapannya dalam proses pembelajaran (Stronge, 2004). Burden dan Byrd (2010:3) mengelompokkan 3 karakteristik utama pendidik yang efektif, yaitu pendidik harus memiliki *knowledge*, *skills*, dan *disposition*. Hal demikian berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pembelajaran dan pada akhirnya berpengaruh terhadap keberhasilan program pembelajaran.

Kelima, temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan dan administrasi penyelenggaraan program kursus program masih perlu dibenahi. Fakta lapang menunjukkan bahwa penyiapan rencana pembiayaan program kursus kurang terencana dengan baik, dan dana *blockgrant* masih sangat dibutuhkan. Dalam sesi FGD didapatkan keterangan bahwa; (1) penggunaan dana program kursus cenderung dicampur dengan dana usaha pemilik LKP; (2) kurangnya upaya menjaring dana dari berbagai sumber selain dari peserta didik dan itu merupakan kreativitas penyelenggara dalam mengelola kursus. Pemanfaatan dana yang tersedia di lembaga kursus merupakan indikator tentang profesionalitas pengelolaan lembaga. Rata-rata dana yang digunakan untuk mengelola lembaga pendidikan cenderung pas-pasan. Pertanggungjawaban pengelolaan program merupakan indikator adanya kesadaran akuntabilitas para penyelenggara kursus. Dalam sesi FGD diperoleh keterangan bahwa laporan pertanggungjawaban ini hanya dilakukan ketika dan terkait dengan *block grant*. Untuk program reguler laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan sama sekali.

### ***Efektivitas Komponen Proses***

Efektivitas komponen proses penyelenggaraan program kursus yang dilaksanakan oleh LKP di Kabupaten dan Kota Bandung termasuk kategori cukup efektif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran program kursus oleh LKP belum optimal dan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar proses yang ditetapkan. Proporsi materi pembelajaran sudah sesuai dengan orientasi program, praktik lebih banyak dari teori.

Pada umumnya tidak dilakukan program magang; fokus utama pembelajaran pada penguasaan kompetensi vokasional semata.

Kedua, kemampuan instruktur melakukan kegiatan pembelajaran masih belum optimal dan masih perlu ditingkatkan. Indikatornya adalah; (1) kemampuan melakukan kegiatan pembelajaran masih belum memadai; (2) sebagian besar instruktur tidak memiliki latar belakang pendidikan formal bidang kependidikan dan belum menjalani diklat kompetensi pendidik dan mengajar pendidikan nonformal; (3) tingkat kesertaan pada kegiatan diklat metode dan teknik pembelajaran rendah; (4) pemahaman instruktur terhadap konsep pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) beragam dan cenderung kurang. Instruktur yang berkompoten untuk mengajar adalah instruktur yang mempunyai pengetahuan dan menguasai materi yang diajarkan, serta pengetahuan lain yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran (*knowledge related to teaching in general, pedagogical knowledge, dan pedagogical content knowledge*) (Burden dan Byrd, 2010). Sejumlah kompetensi dasar yang harus dikuasai instruktur adalah; (1) menguasai bahan/materi pelajaran; (2) mampu mengelola program pembelajaran; (3) mampu mengelola kelas; (4) mampu menggunakan media dan sumber belajar; dan 5) mampu mengelola interaksi pembelajaran (Rusman, 2010:51), dan ragam kompetensi dasar itu belum seluruhnya dimiliki oleh instruktur kursus di Kabupaten dan Kota Bandung.

Ketiga, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian penghargaan dan perlindungan (*harlindung*) kepada instruktur masih rendah. Hal demikian ditunjukkan oleh fakta bahwa; 1) sebagian besar instruktur berstatus sebagai pegawai kontrak; 2) instruktur tidak menerima gaji tetap per bulan; 3) gaji atau upah yang diterima dalam satu bulan pada umumnya kurang dari 1 juta rupiah; 4) instruktur tidak menerima tunjangan lain selain upah; 5) jenjang karier instruktur pada LKP tidak jelas. Hal demikian dapat dimaknai bahwa pemberian penghargaan dan perlindungan (*harlindung*) oleh LKP terhadap instruktur belum diatur secara sistematis dan memadai. Pada sisi lain juga diketahui bahwa proses rekrutasi, mobilisasi, dan demobilisasi instruktur belum dilakukan secara sistematis menurut alasan-alasan yang masuk akal. Rekrutasi instruktur masih dilakukan secara

insidental, tergantung hubungan yang bersifat personal, dan belum ada aturan bakunya. Dengan situasi yang demikian mudah untuk dimengerti bila para instruktur belum memiliki kompetensi mendidik dan mengajar sebagaimana yang seharusnya terjadi pada diri seorang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal.

Keempat, temuan penelitian menunjukkan bahwa penilaian hasil belajar dilaksanakan di LKP dan sebagian kecil saja yang melaksanakan uji kompetensi pada TUK. Sebagian besar peserta hanya mengikuti ujian akhir yang diselenggarakan oleh LKP dengan tingkat kelulusan cukup tinggi. Hanya sebagian kecil saja peserta didik yang berminat mengikuti uji kompetensi pada TUK. Kurangnya minat peserta mengikuti uji kompetensi pada TUK karena alasan jarak TUK yang cukup jauh, masalah biaya, dan TUK yang ada hanya untuk jenis profesi tertentu.

### **Efektivitas Komponen Output**

Efektivitas komponen *output* program kursus yang dilaksanakan oleh LKP di Kabupaten dan Kota Bandung termasuk kategori cukup efektif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Keluaran atau *output* program kursus adalah terjadinya perubahan perilaku pada diri peserta baik berupa penambahan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap yang berkaitan dengan kesiapan memasuki dunia kerja dan industri atau berkaitan dengan memulai bekerja mandiri berwirausaha. Dengan tingkat kelulusan peserta yang tinggi dan dengan tingkat kemampuan pada tingkat mahir ternyata belum mampu mendongkrak tingkat keterserapan lulusan kursus pada dunia kerja atau kemampuan melakukan usaha mandiri (berwirausaha).

Data penelitian menunjukkan bahwa evaluasi hasil belajar telah dilakukan, namun demikian desain evaluasinya masih bersifat instrumental, teknis, administratif, dan belum dilakukan secara substantif yang dapat dipakai sebagai dasar untuk memprediksi *outcome* program secara substantif. Evaluasi memiliki peran penting dalam keseluruhan program pembelajaran dan pendidikan, termasuk pada program kursus. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat perolehan hasil belajar peserta didik, keefektifan program yang telah tengah dilaksanakan atau

juga dampak program yang telah dilaksanakan pada masa lalu.

Untuk mengetahui peran dan kegunaan evaluasi pada program kursus, maka perancang, pelaksana, dan evaluator program kursus harus memahami konsep evaluasi dan peranannya dalam keseluruhan program pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran seperti kursus akan lebih sempurna apabila dilakukan dalam model evaluasi lima tahap yang dinilai paling relevan untuk diimplementasikan pada evaluasi program pembelajaran pendidikan nonformal termasuk program kursus (Batchelor, 2001), yaitu meliputi tahap 1 *reaction and planned action*, tahap 2 *cognitive learning and retention*, tahap 3 *on-the-job application*, tahap 4 *performance results*, dan tahap 5 *return-on-investment (ROI)*

Jenjang pertama, adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengukur reaksi dan rencana aksi peserta dalam menindaklanjuti hasil pembelajaran. Jenjang kedua, memfokuskan evaluasi pada apa yang masih diingat dan telah dipelajari. Jenjang ketiga, evaluasi untuk mengukur penerapan hasil belajar di tempat kerja. Jenjang keempat, evaluasi untuk mengukur hasil usaha yang didapat organisasi, perusahaan, dan peserta program. Jenjang kelima evaluasi tentang *return on investment* atau keuntungan finansial atas biaya telah dikeluarkan oleh perusahaan dan peserta. Evaluasi ini lebih rumit dari empat evaluasi yang lainnya, dan cakupan objeknya lebih komprehensif dan menyeluruh. Pertanyaan yang dijawab meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan efisiensi atau pertanggungjawaban penggunaan dana atau aspek finansial. Kebanyakan evaluasi program pembelajaran dilakukan pada jenjang yang pertama dan kedua, atau paling tinggi hanya pada jenjang keempat, sementara itu sedikit sekali evaluasi jenjang kelima dilakukan.

Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah waktu pelaksanaan pada setiap jenjang evaluasi. Meskipun tidak ada ancaran waktu yang jelas, namun perkiraan kapan saat evaluasi harus dilakukan dapat dan harus diperkirakan, tidak bisa dilakukan sembarang waktu. Jenjang pertama, ditujukan untuk mengukur dan menilai reaksi dan rencana aksi peserta untuk menindaklanjuti hasil program pembelajaran, dilakukan sesaat setelah program berakhir, kira-kira sesaat sebelum penutupan kegiatan dila-

kukan. Jenjang kedua, ditujukan untuk mengukur dan menilai apa yang masih diingat dan telah dipelajari peserta, dilakukan satu sampai dengan dua bulan setelah program berakhir. Jenjang ketiga, ditujukan untuk mengukur penerapan hasil belajar peserta di tempat kerja, dilakukan kira-kira antara dua sampai dengan enam bulan setelah program berakhir. Jenjang keempat, ditujukan untuk mengukur dan menilai hasil usaha atau keuntungan yang didapat oleh organisasi, perusahaan, dan peserta, dilakukan setelah enam sampai satu tahun program berakhir. Jenjang kelima, ditujukan untuk mengukur dan menilai *return on investment* atau keuntungan finansial atas biaya diklat yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan peserta, dilakukan kurang lebih satu tahun setelah program usai dilaksanakan.

### ***Efektivitas Peran Instansi Pemerintah***

Efektivitas peran instansi pemerintah terhadap penyelenggaraan program kursus di Kabupaten dan Kota Bandung termasuk kategori kurang efektif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Peran instansi Pemerintah dalam pembinaan program kursus dalam penelitian ini dipahami sebagai ragam dan kualitas tindakan mendorong dan memfasilitasi yang dilakukan agensi pemerintah daerah dalam menumbuhkembangkan program kursus, khususnya yang dilakukan penilik sesuai dengan tupoksinya sebagai supervisor program-program pendidikan nonformal.

Pada bagian ini yang menarik untuk dibahas adalah lemahnya kontrol dan pengendalian dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan program kursus. Dinas Pendidikan belum memiliki *database* LKP secara lengkap di wilayah kerjanya. Sebagai tenaga organis Dinas Pendidikan, penilik kurang merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawasi atau membina program kursus. Pemahaman terhadap penyelenggaraan program kursus beragam dan cenderung tidak mengetahui desain dan operasional program kursus. Frekuensi supervisi oleh Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan program kursus di wilayah kerjanya termasuk kategori rendah. Materi pembinaan yang pada umumnya tidak sesuai dengan yang betul-betul dibutuhkan LKP dalam penyelenggaraan kursus, dan belum menyentuh pada aspek pengembangan usaha kursus.

Penilik ternyata sangat kurang memiliki pengetahuan dan kurang memiliki akses yang cukup tentang kursus. Padahal berdasarkan tupoksinya, penilik adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI). (Kepmenpan Nomor 14 Tahun 2010, tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya).

Penilik semestinya menjadi tempat bertanya, berkonsultasi, dan atau mendapatkan pencerahan bagi para pelaku praktisi, penyelenggara, dan pembina satuan dan program PNFI dan PAUD, termasuk LPK yang mengalami kesulitan, menghadapi masalah, atau mendapatkan inspirasi dalam pengembangan program. Dengan kemampuan manajerial dan supervisional yang dimiliki, seorang penilik seharusnya mampu menjawab atau memberikan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi kelompok binaan atau klien. Namun kenyataan lapangan menunjukkan betapa konsepsi demikian masih jauh dari kenyataan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berpijak pada capaian efektivitas pada komponen masukan (*input*), komponen proses, dan komponen *output* penyelenggaraan program kursus, serta capaian efektivitas fungsi supervisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap penyelenggaraan kursus dapat disimpulkan bahwa; (1) penyelenggaraan kursus yang diselenggarakan oleh LKP di Kabupaten dan Kota Bandung termasuk kategori kurang efektif; dan (2) peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan fungsi supervisi dan monitoring terhadap penyelenggaraan kursus di Kabupaten dan Kota Bandung termasuk kategori kurang efektif.

### **Saran**

Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan bagi perbaikan dan efektivitas penyelenggaraan kursus di Kabupaten dan Kota Bandung sebagai berikut; (1) dana *block grant* yang diluncurkan oleh pemerin-

tah masih dibutuhkan oleh karena itu perlu dilanjutkan, namun demikian proses seleksi LKP calon penerima *block grant* hendaknya dilakukan lebih selektif. *Track record* dan *success story* LKP menjadi bahan pertimbangan utama untuk menentukan penerima dana *block grant*. Lebih disukai bila skema *block grant* diubah menjadi skema insentif kepada LKP yang *track record*-nya bagus dalam penyelenggaraan kursus. Penilaian dan pemilihan LKP calon penerima insentif sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen, jumlah dana insentif lebih besar dan signifikan bagi pengembangan LKP; (2) dibutuhkan pengembangan model diklat bagi peningkatan kompetensi instruktur, dan untuk itu dibutuhkan dukungan kebijakan dan pendanaan, serta pengembangan kurikulum dan modulnya. Untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi instruktur dibutuhkan dukungan kebijakan khususnya yang terkait dengan pemberian harlindung bagi instruktur kursus; (3) perlu dikembangkan model pengawasan dan pengendalian mutu program dan mutu lulusan, serta dukungan kebijakan dan pembiayaannya; dan (4) dibutuhkan dikembangkan *model diklat* bagi peningkatan kompetensi penilik dalam supervisi/pembinaan penyelenggaraan kursus.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Burden, Paul R. dan David M. Byrd. 2010. *Methods for Effective Teaching, Meeting the Needs of All Students*. Boston: Allyn and Bacon.
- Dessler, Gary. 2004, *Sumber Daya Manusia*, Penerjemah Eli Tanya Jakarta: PT. Indeks. Judul asli *Human Resource Management*. New Jersey: Prentice-Hall, inc, Upper Saddle River
- Ditjen PMPTK, Depdiknas. 2007. *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan dan Dampak Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pendidikan Formal*. Jakarta: Ditjen PMPTK.
- Evans, David R. 1981. *The Panning of Non-formal Education*. Paris: The United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Foxon, M. 1989. "Evaluation of training and development programs". *Australian Journal of Educational Technology*. Vol. 5 No.2, 1989
- Joesoef, Soelaiman. 1999. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Knowles, Malcom S. 1995. *The Modern Practice of Adult Education; From Pedagogy to Andragogy*. Chicago: Follet Publishing Co.
- Mawardi, Fanny. 2006. "Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pemerintah DKI Jakarta dalam Rangka Pengembangan SDM." *Disertasi*, Universitas Negeri Jakarta.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni. 2009. *Education Management, Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rusman. 2010. *Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Press
- Sihombing, Umberto. 1999. *Pendidikan Luar Sekolah, Kini dan Masa Depan*. Jakarta: PD Mahkota.
- Stronge, James H., Pamela D. Tucker, dan Jennifer L Hindman. 2004. *Hands-book for Qualities of Effective Teachers*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Tracey, Brian. 1989. *Management Training*. Bombay: Taraporevala Publishing.